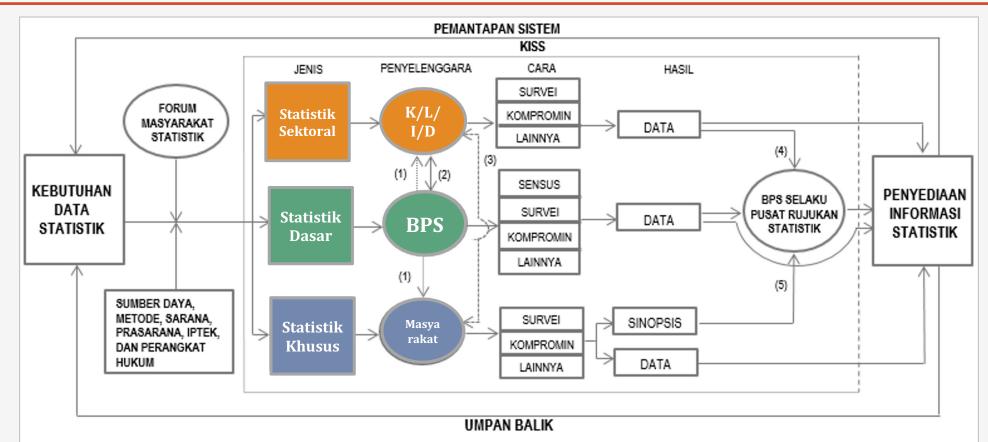
Sinergi Wilayah Sumatera untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Dra.Hj.Elviana,M.Si

Ketua Komite IV DPD RI

SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN)



KETERANGAN:

KISS : Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Standardisasi

KOMPROMIN : Kompilasi Produk Administrasi

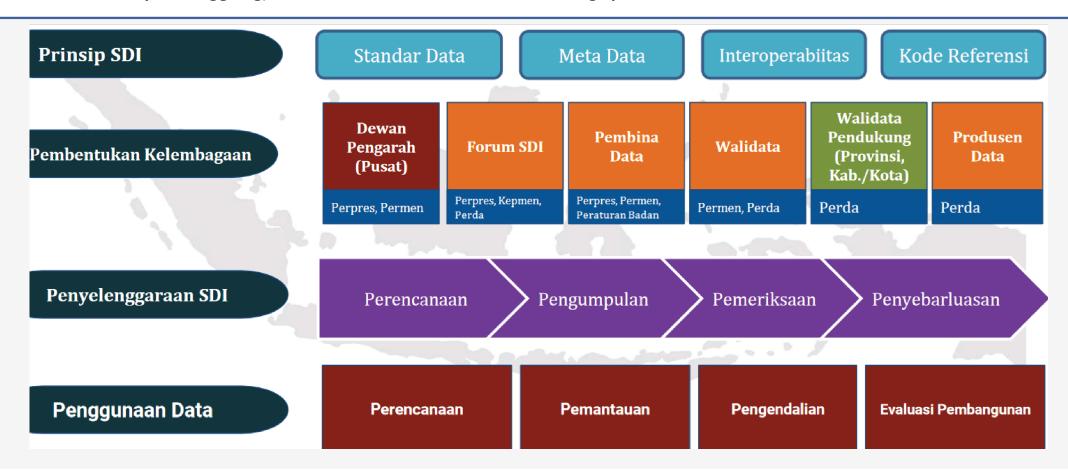
- (1) : BPS mengkoordinasikan penyelenggaraan statistik
- (2) : Instansi Pemerintah memberitahukan rancangan survei

dan BPS memberikan Rekomendasi

- (3) : Instansi Pemerintah dan Masyarakat saling berkoordinasi dan kerjasama
- (4) : Instansi Pemerintah menyerahkan hasil ke Pusat Rujukan Statistik
- (5) : Masyarakat menyerahkan sinopsiske Pusat Rujukan Statistik

SATU DATA INDONESIA

Penguatan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi-pakaikan antar Instansi Pemerintah.



PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

Sustainable Development Goals (2015-2030)





- Ø

13 CLIMATE ACTION













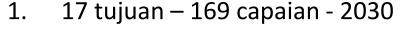












- 2. Belajar dari kesuksesan MDG Pertumbuhan ekonomi, pekerjaan, energi, *climate change* dan lingkungan dll
- 3. Dikerjakan oleh Pemerintah dan Non Pemerintah



TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) WILAYAH SUMATERA – AGUSTUS 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pulau Sumatera	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	6,17	6,59	6,30	6,17	6,03
Sumatera Utara	5,39	6,91	6,33	6,16	5,89
Sumatera Barat	5,38	6,88	6,52	6,28	5,94
Riau	5,76	6,32	4,42	4,37	4,23
Jambi	4,06	5,13	5,09	4,59	4,53
Sumatera Selatan	4,53	5,51	4,98	4,63	4,11
Bengkulu	3,26	4,07	3,65	3,59	3,42
Lampung	4,03	4,67	4,69	4,52	4,23
Kep. Bangka Belitung	3,58	5,25	5,03	4,77	4,56
Kep. Riau	7,50	10,34	9,91	8,23	6,80

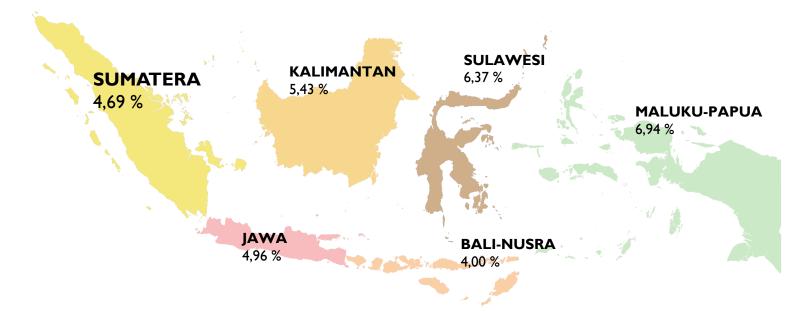
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) – Agustus 2023 paling besar ada di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 6,80% dan terendah di Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 3,42%



PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2023

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia per Pulau	Sumatera	Jawa	Bali-Nusra	Kalimantan	Sulawesi	Maluku & Papua
2019	4,50	5,50	5,00	5,00	7,00	5,80
2020	-1,20	-2,50	-5,00	-2,30	0,20	2,00
2021	3,20	3,66	3,24	3,24	5,67	10,22
2022	4,70	5,31	5,08	4,94	7,07	8,67
2023	4,69	4,96	4,00	5,43	6,37	6,94

Pulau Sumatera menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia kedua terbesar setelah Pulau Jawa, dengan kontribusi pertumbuhan sebesar 22,01%



PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH SUMATERA TAHUN 2023

Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sumatera	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	4,14	-0,37	2,81	4,21	4,23
Sumatera Utara	5,22	-1,07	2,61	4,73	5,01
Sumatera Barat	5,01	-1,61	3,29	4,36	4,30
Riau	2,81	-1,13	3,36	4,55	4,02
Jambi	4,35	-0,51	3,69	5,13	4,03
Sumatera Selatan	5,69	-0,11	3,58	5,23	5,08
Bengkulu	4,94	-0,02	3,27	4,31	4,26
Lampung	5,26	-1,66	2,77	4,28	5,40
Kep. Bangka Belitung	3,32	-2,29	5,05	4,40	4,00
Kep. Riau	4,83	-3,80	3,43	5,09	5,20

Provinsi Sumatera Selatan

menjadi pendorong
pertumbuhan Wilayah
Sumatera dapat tumbuh
sebesar 5,08%. sejalan
dengan peningkatan kinerja
ekspor, pertanian,
Perttambangan dan industri

Perekonomian Wilayah
Sumatera pada Tahun 2023
tumbuh sebesar 4,69%
seiring dengan
peningkatan aktivitas
masyarakat dan
perdagangan.



TINGKAT KEMISKINAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2023



Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	2019	2020	2021	2022	2023
SUMATERA	5,851.28	5,837.47	6,064.30	5,737.41	5,669.17
Aceh	819.44	814.91	834.24	806.82	806.75
Sumatera Utara	1,282.04	1,283.29	1,343.86	1,268.19	1,239.71
Sumatera Barat	348.22	344.23	370.67	335.21	340.37
Riau	490.72	483.39	500.81	485.03	485.66
Jambi	274.32	277.80	293.86	279.37	280.68
Sumatera Selatan	1,073.74	1,081.58	1,113.76	1,044.69	1,045.68
Bengkulu	302.30	302.58	306.00	297.23	288.46
Lampung	1,063.66	1,049.32	1,083.93	1,002.41	970.67
Kepulauan Bangka Belitung	68.38	68.40	72.71	66.78	68.69
Kepulauan Riau	128.46	131.97	144.46	151.68	142.50

Persentase Penduduk Miskin sumatera pada tahun 2023 adalah sebesar 9,33%. Persentase penduduk miskin paling besar ada di Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 13,56% dan terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 3,39%

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA WILAYAH SUMATERA TAHUN 2023



Dec 100 Mark and 1100 Mark	Laki-laki				Perempuan			
Provinsi/Kabupaten/Kota	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
ACEH	78.47	78.05	77.41	77.28	72.75	72.08	71.5	71.26
SUMATERA UTARA	78.99	78.56	77.99	77.8	72.43	71.76	70.93	70.67
SUMATERA BARAT	78.63	78.25	77.85	77.62	75.12	74.53	73.77	73.39
RIAU	79.03	78.66	78.27	78.07	70.74	70.2	69.54	69.16
JAMBI	77.92	77.44	77.05	76.81	69.9	69.16	68.52	68.16
SUMATERA SELATAN	76.49	75.98	75.53	75.33	71.75	70.97	70.04	69.84
BENGKULU	78.05	77.58	77.13	76.9	71.6	70.95	70.41	70.12
LAMPUNG	76.21	75.62	75.17	74.97	69.6	68.89	68.29	68.06
KEP. BANGKA BELITUNG	77.92	77.53	77.15	76.94	70.36	69.74	69.03	68.69
KEPULAUAN RIAU	82.27	81.88	81.28	81.17	78.02	77.23	76.61	76.34

IPM tertinggi di wilayah Sumatera pada tahun 2023 adalah Provinsi Kepulauan Riau (79,09) dan terendah adalah Provinsi Lampung (72,48)

ANGGOTA PARLEMEN DI PULAU SUMATERA 2019 – 2024

Provinsi	Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Tahun 2024 (Ribu Orang)	_	Anggota PR-RI DPD-RI
SUMATERA	61.515,78	125	40
Aceh	5.554,82	13	4
Sumatera Utara	15.588,53	30	4
Sumatera Barat	5.836,16	14	4
Riau	6.728,05	13	4
Jambi	3.724,28	8	4
Sumatera Selatan	8.837,30	16	4
Bengkulu	2.112,24	4	4
Lampung	9.419,58	20	4
Kep. Bangka Belitung	1.531,53	3	4
Kep. Riau	2.183,29	4	4



PERAN PARLEMEN



- Penetapan Indikator
- Kebijakan & Program
- Persiapan Data dan Informasi
- · Sosialisasi/Diseminasi, Komunikasi & Advokasi
- Money & Pelaporan
- Dukungan Regulasi &/ Anggaran

Pemerintah

- Peningkatan Kapasitas
- Pemantauan dan Evaluasi
- Policy Paper/Policy Brief sebagai dasar Policy Formulation

& Parlemen

OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) & Media

Akademisi &

Pakar

- Diseminasi dan Advokasi
- Fasilitasi Program
- Membangun pemahaman publik
- Diseminasi dan **Monitoring**

Filantropi & Bisnis

- Advokasi Pelaku Usaha
- Fasilitasi Program
- Peningkatan Kapasitas
- Dukungan Pendanaan

OPTIMALISASI PERAN DPD-RI



Mendorong Pengesahan Regulasi yang Mendukung Penguatan Data



Pengawasan dan Evaluasi Program Statistik



Peningkatan Anggaran dan Sumber Daya



Meningkatkan Kapasitas dan Kolaborasi Antar Instansi



Membentuk Kemitraan dengan Sektor Swasta dan Akademisi:



Advokasi Pentingnya Data dalam Pengambilan Kebijakan



Memfasilitasi Pendidikan Publik Mengenai Data Statistik